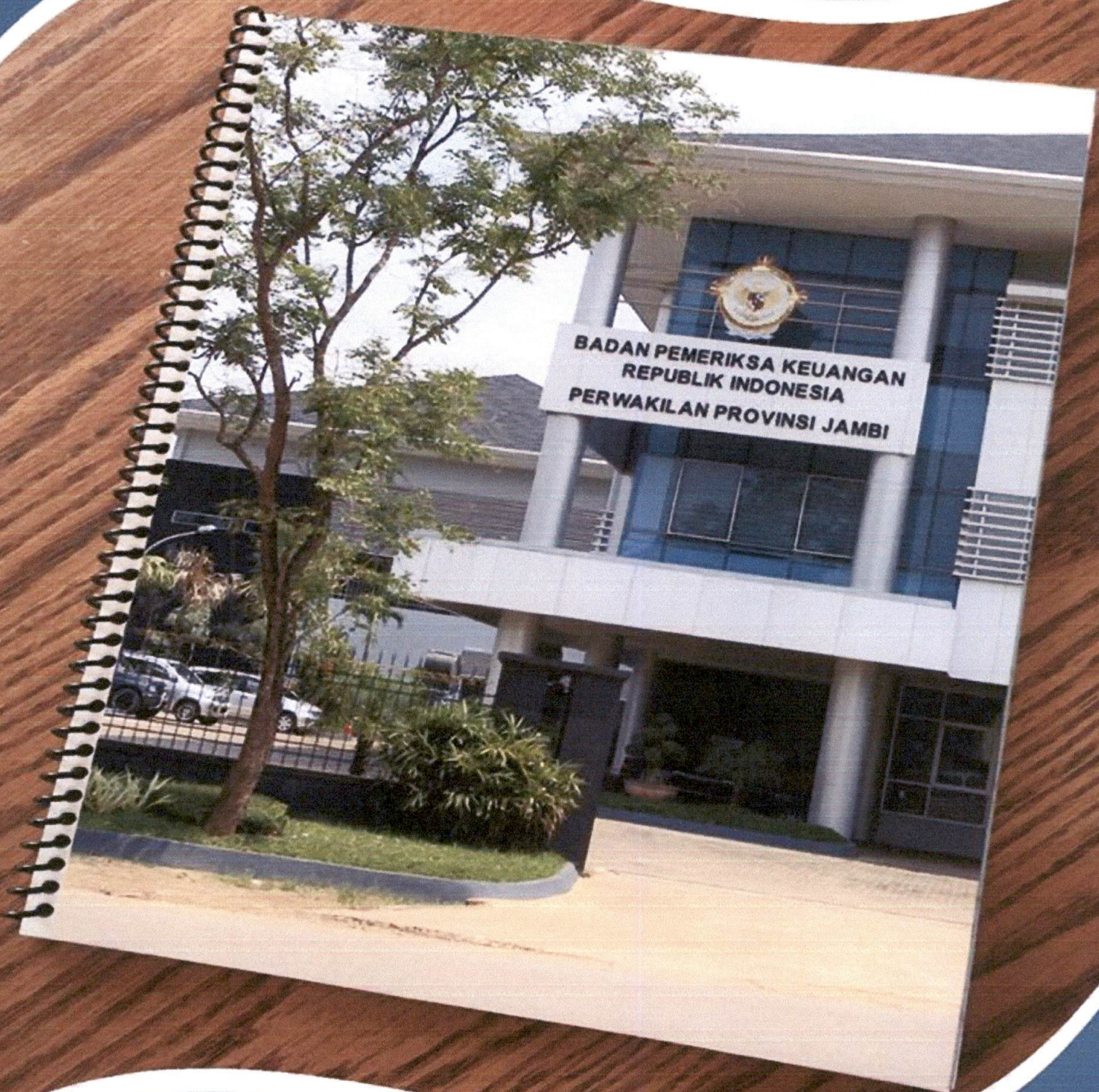




# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2020



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang diberikan pada suatu Satuan Kerja dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2020. LAKIN adalah bentuk penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis tahun 2020. LAKIN selain merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, juga sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi menuju terwujudnya organisasi yang akuntabel, transparan dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Jambi merupakan salah satu Satuan Kerja BPK yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota/kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Berdasarkan data bezetting per 31 Desember 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jambi memiliki jumlah pegawai sebanyak 118 orang, yang terdiri dari 9 orang Pejabat Struktural, 63 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa, 22 orang Staf Administrasi, dan 19 orang Pegawai Tidak Tetap. Alokasi anggaran yang dikelola dalam tahun anggaran 2020 sebesar Rp19.156.491.000,00 sedangkan target dan sasaran kinerja Satker dituangkan dalam Pernyataan Komitmen dan Perjanjian Kinerja (PKPK) 2020 yang berisikan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja.

### INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Indikator Kinerja		Target
Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen PKPK Tahun 2020 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 13 IKU, sebanyak 9 IKU (69,23%) berstatus hijau dan 4 IKU (30,77%) berstatus kuning serta tidak terdapat capaian target IKU yang berstatus merah. Sedangkan dalam rangka membiayai kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dari alokasi anggaran sebesar Rp19.448.625.000,00 (pagu setelah revisi anggaran) dapat direalisasikan sebesar Rp18.764.993.133,00 atau 96,50%.

Secara rinci data target dan realisasi IKU BPK Perwakilan Provinsi Jambi tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020**

Sasaran Kegiatan / Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Skor IKU
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	95,83%	95,83
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	70,70%	94,27

Sasaran Kegiatan / Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Skor IKU
Pemeriksaan	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,63%	100,63
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,50	90,00
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,88)	102,19
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,31%	104,54
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	125%	105,00
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,84	101,05
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,95%	98,95
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	93,30%	105,00

## Kata Pengantar



Laporan Kinerja (LAKIN) adalah media pertanggungjawaban Manajemen Satuan Kerja atas kinerja capaian target Indikator Kinerja Utama yang telah disepakati bersama oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan Tortama KN V sebagaimana tertuang dalam PKPK 2020. Penyusunan LAKIN 2020 dibuat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan 2016 – 2020 yang dituangkan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan no. 7/K/I-XVIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015.

Pada tahun 2020 dari 13 Indikator Kinerja Utama, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah dapat mencapai target yang ditetapkan (status hijau) sebanyak 9 IKU, 4 IKU dengan status kuning, dan tidak terdapat indikator dengan status merah. Terhadap IKU yang belum mencapai target, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan melakukan pembenahan terhadap hal-hal yang mempengaruhi capaian target untuk perbaikan di masa mendatang. Sedangkan pencapaian IKU yang telah sesuai target tidak terlepas dari kerjasama yang baik seluruh unsur pegawai baik Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Pemeriksa maupun Pegawai Administrasi serta bimbingan seluruh Pimpinan baik Badan maupun Auditorat Utama Keuangan Negara V.

Akhir kata semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan seluruh stakeholder BPK Perwakilan Provinsi Jambi, baik masyarakat maupun seluruh unsur Pimpinan atas amanah yang diberikan dan target kinerja yang telah ditetapkan, dan menjadi pendorong bagi capaian target kinerja di tahun mendatang.

Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Rio Tirta

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	I
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII
DAFTAR LAMPIRAN.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI.....	1
C. PERAN STRATEGIS.....	5
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
E. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	8
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.....	9
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	14
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020.....	25
C. KINERJA LAINNYA.....	29
PENUTUP.....	30

## DAFTAR TABEL

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020.....	I
Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020.....	II
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan IKU Tahun 2020.....	12
Tabel 2.2. Sasaran Kegiatan dan Anggaran dan IKU Tahun 2020.....	13
Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2020.....	14
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Target IKU 2020 dan 2019.....	15
Tabel 3.3 Pemenuhan QC dan QA Tahun 2020.....	16
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020...	17
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020...	18
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Penyelesaian TLRHP per Status Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.....	19
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020....	21
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020....	22
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020....	23
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020..	25
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020..	26
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020..	27
Tabel 3.13 Alokasi dan Revisi Anggaran 2020.....	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi .....	2
Gambar 1-2 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi .....	8
Gambar 2-1 Peta Strategi Tortama KN V dan BPK Perwakilan Prov. Jambi .....	11



## DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

BPK Perwakilan Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Perwakilan BPK setingkat eselon II di bawah Auditorat Keuangan Negara V yang bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V. Sebagai Satuan Kerja, Perwakilan BPK di daerah, BPK Perwakilan Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota dan kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam menjalankan tugas yang diemban, BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada tahun anggaran mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 19.156.491.000,00. Alokasi anggaran sebesar tersebut di atas digunakan untuk mencapai visi dan misi BPK sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2020 – 2024 melalui rangkaian target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai dan telah dituangkan dalam Pernyataan Komitmen dan Pencapaian Kinerja (PKPK) 2020 yang telah disepakati.

Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sebagai media pertanggungjawaban pencapaian target kinerja maupun pengelolaan anggaran, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi. LAKIN yang merupakan laporan berkala, disusun sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan 2016 – 2020 yang dituangkan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 7/K/I-XVIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015.

## B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

BPK Perwakilan Provinsi sebelum menjadi suatu Satuan Kerja yang berdiri sendiri, sejak tanggal 17 Januari 2002 merupakan bagian dari BPK RI Perwakilan II Palembang yang meliputi lima provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung dengan membawahi 11 daerah di lingkungan Provinsi Jambi saat itu, yaitu satu pemerintah Provinsi, satu pemerintah kota, dan sembilan pemerintah Kabupaten. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdirilah Perwakilan BPK RI di Jambi dan diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2007.

Pada awal berdirinya, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menggunakan gedung dengan status pinjam pakai Pemerintah Provinsi Jambi yang berlokasi di Jl. Lingkar Barat I Pal 10 No. 78 Jambi. Pada tanggal 27 September 2010 BPK Perwakilan Provinsi Jambi memiliki kantor sendiri berlokasi di Jl. Pangeran Hidayat KM 6,5 No. 65 Jambi. Peresmian kantor dilakukan oleh Ketua BPK saat itu Drs. Hadi Poernomo, Ak.

**Gambar 1-1**  
**Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi**



*Gedung Lama Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi  
27 Agustus 2007 s.d. 26 September 2010*



*Gedung Baru Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi  
27 September 2010 s.d. Sekarang*

BPK Perwakilan Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Perwakilan BPK setingkat eselon II di bawah Auditorat Keuangan Negara V yang bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V. Sebagai Perwakilan BPK di daerah, BPK Perwakilan Provinsi Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota dan kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. BPK Perwakilan Provinsi Jambi membawahi 12 entitas pemerintah daerah, yang terdiri

dari satu entitas pemerintah provinsi, dua entitas pemerintah kota dan sembilan entitas pemerintah kabupaten, yaitu :

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| a. Pemerintah Provinsi Jambi        | b. Pemerintah Kabupaten Tebo                 |
| c. Pemerintah Kota Jambi            | d. Pemerintah Kabupaten Merangin             |
| e. Pemerintah Kota Sungai Penuh     | f. Pemerintah Kabupaten Sarolangun           |
| g. Pemerintah Kabupaten Kerinci     | h. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| i. Pemerintah Kabupaten Batang Hari | j. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
| k. Pemerintah Kabupaten Bungo       | l. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi          |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jambi berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;

- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

BPK Perwakilan Jambi dipimpin oleh seorang Kepala dengan tiga unit kerja setingkat Eselon III yaitu Sekretariat Perwakilan, Subauditorat Jambi I dan Subauditorat Jambi II.

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi PRISMA dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Subauditorat Jambi I dan II masing-masing mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk :

1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

### C. PERAN STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan, turut berperan aktif dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

- Visi : Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara
- Misi : 1.Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan,  
2.Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara,  
3.Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya
- Tujuan : Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat
- Sasaran Strategis : Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti

## kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi

Sasaran strategis dicapai melalui 5 (lima) strategi yang dikelompokkan dalam 2 (dua) arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari 5 (lima) strategi sebagai berikut.

1. Strategi 1 : meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
2. Strategi 2 : meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
3. Strategi 3 : meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
4. Strategi 4 : mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan
5. Strategi 5 : menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Dalam mendukung capaian hal tersebut pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jambi memiliki 13 Indikator Kinerja pada satu Sasaran Kegiatan dan dua Sasaran, yaitu :

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemeriksaan Yang Bermutu Tinggi

Sasaran : 1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas  
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Indikator Kinerja Utama : 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan  
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan  
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan  
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
8. Hasil Evaluasi AKIP
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
13. Tingkat Kinerja Anggaran

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi ditetapkan sesuai Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan,. BPK Perwakilan Provinsi Jambi dipimpin oleh Seorang Kepala Perwakilan setingkat Eselon II yang membawahi :

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Jambi I;
- c. Subauditorat Jambi II; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Sekretariat Perwakilan terdiri atas :

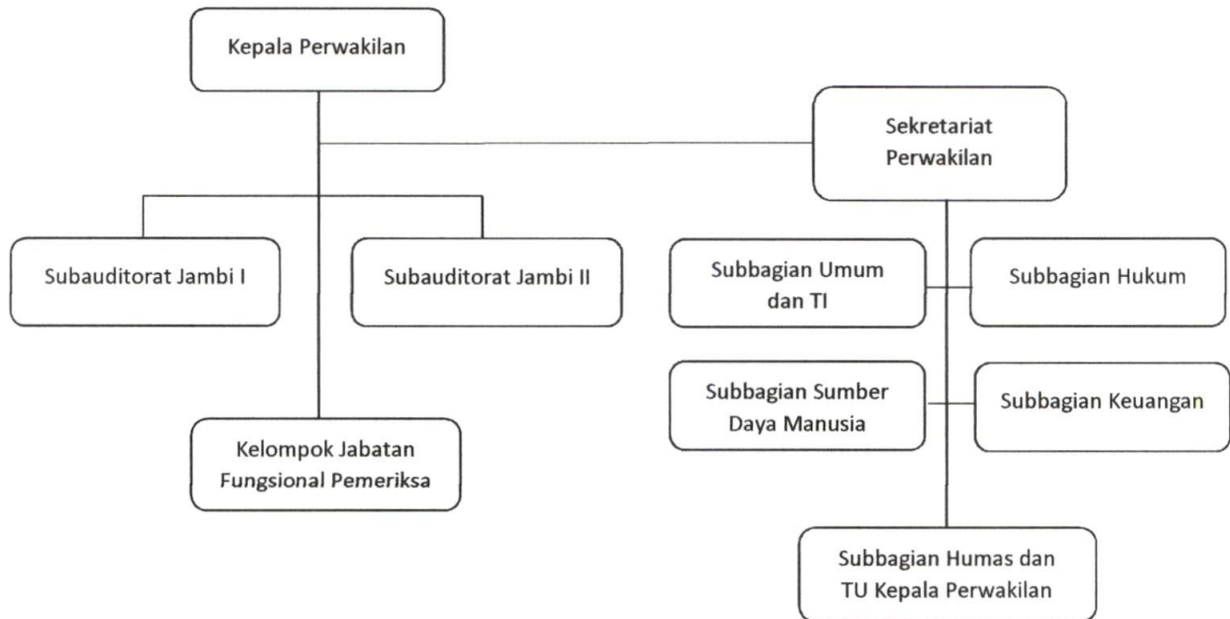
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.

Sesuai data pegawai (*bezetting*) per 31 Desember 2020, BPK Perwakilan Jambi memiliki jumlah pegawai sebanyak 113 orang terdiri dari :

- a. Pejabat Struktural : 9 orang
- b. Pejabat Fungsional Pemeriksa : 63 orang
- c. Staf Administrasi : 22 orang
- d. Pegawai Tidak Tetap : 19 orang



**Gambar 1-2**  
**Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi**



## E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

- |  |  |
|--|--|
| Ikhtisar Eksekutif                             | : menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.  |
| Bab I. Pendahuluan                             | : menguraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi; peran strategis; struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi; serta sistematika pelaporan. |
| Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja | : menguraikan tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun 2020.  |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja                  | : menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.   |
| Bab IV Penutup                                 | : menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.                                    |

## BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jambi 2020 – 2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020 – 2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jambi 2020 – 2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mendapat mandat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Renstra menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. BPK Perwakilan Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan menyusun strategi pemeriksaan dan meningkatkan sinergi dengan IPH dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jambi

akan meningkatkan kualitas sumber daya yang andal dan profesional melalui peningkatan kompetensi.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut.

Strategi 1 : Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;

Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;

Strategi 3 : Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;

Strategi 4 : Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;

Strategi 5 : Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

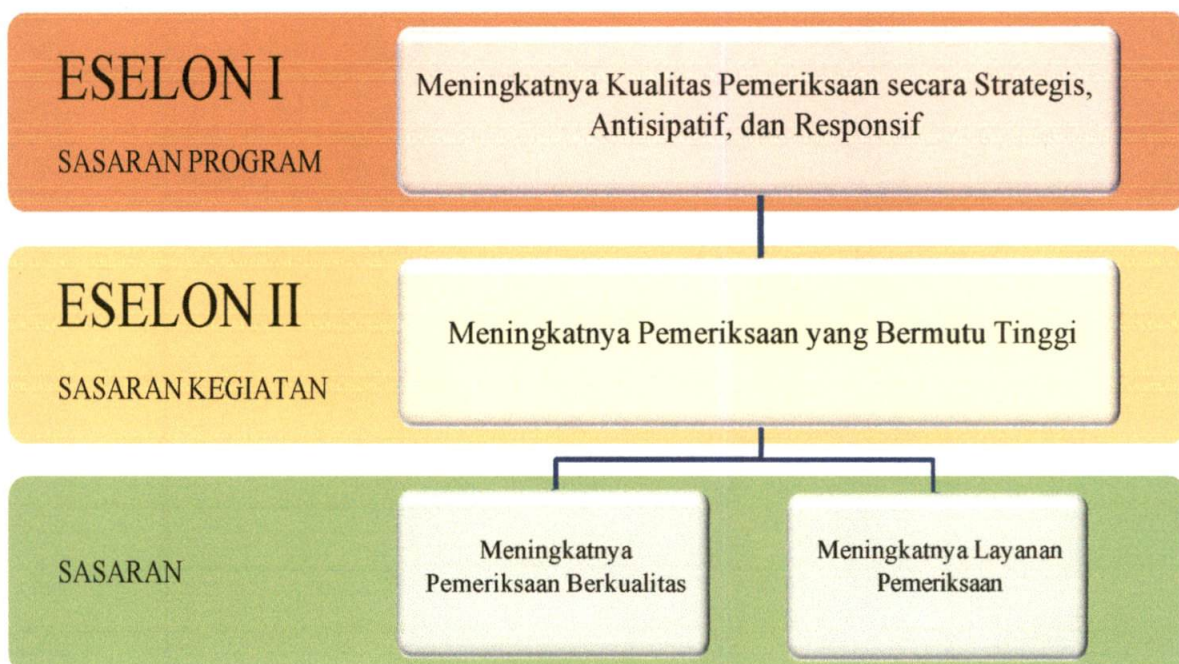
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jambi 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya

keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2020 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disepakati bersama oleh Kepala Perwakilan sebagai Kepala Satuan Kerja dan Tortama KN V selaku Atasan Kepala Perwakilan. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam Peta Strategi baik Tingkat Eselon I (Tortama KN V) maupun BPK Perwakilan Provinsi Jambi sebagai berikut.

**Gambar 2-1**  
**Peta Strategi Tortama KN V dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi**



## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dan dalam bulan Februari 2020, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi menandatangani dalam bentuk kontrak Pernyataan Komitmen dan Perjanjian Kinerja (PKPK) 2020 dengan Auditor Utama Keuangan Negara V selaku atasan langsung. Pada Perjanjian Kinerja tersebut, Indikator Kinerja yang disepakati terdiri dari 1 Sasaran Kegiatan dan Anggaran yang terdiri dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan rincian sebagai berikut.

### 1. Indikator Kinerja

**Tabel 2-1**  
**Sasaran Kegiatan dan IKU Tahun 2020**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas</li><li>Meningkatnya Layanan Pemeriksaan</li></ul>	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran

### 2. Target Kinerja

Target kinerja yang telah disepakati oleh Kepala Perwakilan dan Tortama KN V yang harus dicapai telah dituangkan dalam Pernyataan Komitmen dan Perjanjian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Aceh Tahun 2020. Dalam perjanjian kinerja dimaksud disamping tertuang target kinerja juga alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2020 yang disediakan untuk membiayai kegiatan pencapaian target. Rincian Sasaran Kegiatan dan Anggaran serta Target IKU dan alokasi anggaran yang disediakan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2-2**  
**Sasaran Kegiatan dan Anggaran dan IKU Tahun 2020**

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja Utama		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp19.156.491.000,00	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp6.547.368.000,00	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp12.609.123.000,00	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5)
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86)
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,8)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja tahun 2020 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang telah disepakati dalam PKPK 2020. Berdasarkan hasil pengukuran capaian target kinerja yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK, maka skor yang diperoleh terhadap capaian target dimaksud adalah sebesar **99,36**. Realisasi target masing-masing indikator kinerja utama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3-1**  
**Realisasi Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2020**

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Skor IKU
<p>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas</li> <li>• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan</li> </ul>	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	95,83%	95,83
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	70,70%	94,27
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,63%	100,63
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,50	90,00
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,88)	102,19
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,31%	104,54
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	125%	105,00
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,84	101,05
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,95%	98,95
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	93,30%	105,00

Capaian target kinerja tahun 2020 sebesar 99,36 merupakan hasil upaya seluruh unsur unit kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang secara konsisten dan terus menerus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja Satuan Kerja.

Total skor capaian kinerja tahun 2020 sebesar 99,36, lebih rendah dari skor capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100,76. Secara akumulatif, penurunan capaian skor kinerja ini disebabkan oleh tidak tercapainya empat indikator kinerja dari 13 indikator yang ditetapkan. Secara ringkas, gambaran perolehan skor sebagai berikut.

**Tabel 3-2**  
**Perbandingan Capaian Target IKU 2020 dan 2019**

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Skor Tahun 2020	Skor Tahun 2019	Naik/ (Turun)	
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas</li> <li>• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan</li> </ul>	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	95,83	100,00	Turun
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100,00	N/A	-
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	94,27	98,57	Turun
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,63	N/A	-
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,00	N/A	-
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,00	N/A	-
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	90,00	94,60	Turun
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	102,19	90,00	Naik
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	104,54	100,00	Naik
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	105,00	100,00	Naik
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	101,05	N/A	Naik
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,95	100,00	Turun
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	105,00	105,00	Tetap
<b>Total Skor</b>				<b>99,36</b>	<b>100,76</b>	<b>Turun</b>



## 1. IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reuiu ltama.

Pengukuran IKU 1 diperoleh dari hasil kuesioner yang dilakukan kepada seluruh Tim Pemeriksa baik kepada Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) untuk seluruh tahapan pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan terhadap setiap jenis pemeriksaan baik LKPD, Kinerja maupun PDTT. Kuesioner pemenuhan QC diisi oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa, yang terdiri dari Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu. Sedangkan kuesioner pemenuhan QA diisi oleh Pejabat Struktural Pemeriksa, yang terdiri dari Kepala Subauditorat dan Kepala Satuan Kerja dalam hal ini Kepala Perwakilan. Realisasi pemenuhan QC dan QA tahun 2020 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Pemenuhan QC dan QA Tahun 2020**

No.	Jenis Pemeriksaan	Pemenuhan QC PFP			Pemenuhan QA PSP	
		Reviu KT	Reviu PT	Reviu PJ/WPJ	Reviu KSA	Reviu Kepala Perwakilan
1	Laporan Keuangan ( 12 LHP)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kinerja ( 5 LHP )	100%	100%	100%	100%	100%
3	Dengan Tujuan Tertentu Non Banpol ( 5 LHP )	100%	100%	100%	100%	100%

Hasil evaluasi EPP atas Tingkat Akurasi LHP menunjukkan angka 100% atas semua LHP yang diterbitkan. Tetapi untuk Tingkat Konsistensi LHP menunjukkan terdapat dua LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2019 yaitu atas Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Pemerintah Kabupaten Bungo yang memperoleh nilai 0 karena adanya inkonsistensi pada LHP yang diterbitkan, sesuai Nota Dinas Kepala Direktorat EPP Nomor 392/ND/XII.2/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

Dengan demikian untuk pemenuhan IKU 1 Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jambi hanya dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 95,83% dengan skor sebesar 95,83. Pencapaian atas IKU1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada tahun 2016 - 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-4**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020**

IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian			
			2019	2018	2017	2016
IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	95,83%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan tahun 2016 s.d. 2019 selalu dapat mencapai target yang ditetapkan, sedangkan tahun 2020 yang mendapat nilai 95,83 akan menjadi motivasi di tahun-tahun mendatang agar dapat lebih baik lagi.

## **2. IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). IKU ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). IKU ini merupakan IKU baru yang muncul di Tahun 2020, dengan penilaian skor didapat dari perbandingan Jumlah LHP yang diterbitkan dengan Jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan Harapan Penugasan.

Capaian IKU 2 BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk Tahun 2020 sebesar 100%, sesuai target pada rencana aksi karena Simpulan semua LHP yang diterbitkan telah sesuai dengan Harapan Penugasan.

## **3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan kementerian/lembaga/pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 menyebutkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Sebagai upaya BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan percepatan TLRHP, secara berkala telah dilakukan pembahasan tindak lanjut

dengan entitas. Pada tahun 2020 pembahasan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Forum pembahasan TLRHP selama 2020 dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 14 Juli 2020 dan 7 s.d. 18 Desember 2020. Usaha menambah frekwensi pembahasan membawa pengaruh terhadap meningkatnya persentase penyelesaian TLRHP. Selain itu untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas, disamping melalui forum pembahasan, BPK Perwakilan Provinsi Jambi juga meningkatkan penggunaan aplikasi yang telah disiapkan Kantor Pusat yang berbasis TI, yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi (SiPTL). Dalam upaya menambah pemahaman dan kompetensi entitas pemeriksaan dalam penggunaan SiPTL, BPK Perwakilan Jambi terus menerus memberikan bimbingan kepada seluruh entitas yang dilakukan di setiap kesempatan Forum Pemantauan Tindak Lanjut dan Keruneg yang dilaksanakan dua kali setahun. Keseluruhan upaya tersebut bertujuan untuk mendorong tingkat penyelesaian TLRHP.

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dihitung berdasarkan persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi keseluruhan selama tahun 2005 s.d. 2020. Dan untuk tahun 2005 sampai dengan 2020 jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 9.275 rekomendasi dari 13.119 rekomendasi atau 70,70 % dengan skor 94,27.

**Tabel 3-5**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020**

IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian			
			2019	2018	2017	2016
IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	75,00%	70,70%	73,93%	52,90%	61,37%	60,94%

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa persentase penyelesaian TLRHP dalam lima tahun penilaian menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun kecuali tahun 2018 yang turun dari 61,37% menjadi 52,90% dan tahun 2020 yang turun dari 73,93% menjadi 70,70%. Penurunan capaian tahun 2020 diharapkan dapat menjadi perhatian bagi capaian pada tahun-tahun mendatang, sehingga dari tahun ke tahun secara konsisten akan meningkat.

Untuk tahun 2020 dari data penyelesaian TLRHP tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 menunjukkan jumlah penyelesaian rekomendasi pada setiap Status Penyelesaian sebagai berikut.

**Tabel 3-6**  
**Perbandingan Realisasi Penyelesaian TLRHP per Status Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020**

Uraian	Persentase									
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Jumal Temuan	1704	60,93%	1497	61,37%	1.556	52,90%	5.017	73,93%	5.498	70,70%
Jumlah Rekomendasi	4308		3808		3.951		12.051			
Penyelesaia Status I	2625		2337		2.090		8903			
Penyelesaian Status 2	1445		1230		1.223		2.678			
Penyelesaian Status 3	238		241		638		464			
Penyelesaian Status 4	-	-	-	6	6					

Berdasarkan tabel di atas terlihat hasil upaya peningkatan/percepatan penyelesaian yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jambi cukup membawa hasil, dimana tingkat penyelesaian Status I (tindak lanjut sesuai rekomendasi) yang meningkat pada setiap tahunnya.

#### **4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis,RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

IKU ini merupakan IKU baru, yang muncul di Tahun 2020; dengan penilaian skor didapat dari perbandingan realisasi pemeriksaan tematik nasional dengan rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional, ditambah dengan Alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan.

Capaian IKU 4 BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk Tahun 2020 sebesar 100,63%, karena rencana pemeriksaan tematik yang disusun telah sama dengan realisasi, dan didapat alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan sebesar 0,63.

## **5. IKU 5      Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Peningkatan pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

IKU ini merupakan IKU baru yang muncul di Tahun 2020, dengan penilaian skor didapat dari perbandingan Jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK dengan Seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa.

Capaian IKU 5 BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk Tahun 2020 sebesar 100%, sesuai target pada rencana aksi karena tidak ada permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dari BPK, sehingga skor bertahan di angka 100%, sesuai target.

## **6. IKU 6      Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik lokal.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

IKU ini merupakan IKU baru yang muncul di Tahun 2020, dengan penilaian skor didapat dari perbandingan Realisasi pemeriksaan tematik lokal dengan Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal.

Capaian IKU 6 BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk Tahun 2020 sebesar 100%, sesuai target pada rencana aksi karena tidak ada rencana dan realisasi pemeriksaan tematik lokal, sehingga skor bertahan di angka 100%, sesuai target.

## 7. IKU 7 **Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

IKU ini mengukur tingkat penerapan nilai-nilai dasar BPK sebagai budaya organisasi oleh seluruh komponen BPK. IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Nilai dasar BPK diterapkan dalam organisasi. IKU ini diukur melalui survey yang dilakukan oleh Direktorat PSMK terhadap penerapan nilai-nilai dasar BPK dari para pegawai.

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMK, realisasi tahun 2019 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu total nilai hasil survey 4,50 dari target 5,00. Dengan demikian capaian tahun 2020 hanya sebesar 90,00%. Kondisi yang sama juga untuk capaian tahun 2019 sebesar 4,73 dan tahun 2018 hanya mencapai nilai 4,63. Hal tersebut disebabkan oleh pengisian kuesioner yang dikirimkan Direktorat PSMK tidak mencapai sasaran yang diharapkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas jawaban. Hal tersebut akan menjadi perhatian dan komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk capaian kinerja tahun berikutnya dengan meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya melalui berbagai media seperti sosialisasi dan kegiatan pelatihan di kantor sendiri terkait pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar BPK. IKU 7 muncul di tahun 2019 pada IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.

Capaian IKU 7 dari Tahun 2016 - 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-7**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020**

IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian			
			2019	2018	2017	2016
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,50	4,73	4,63	N/A	N/A

## 8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. IKU tentang Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jambi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. IKU 8 muncul di tahun 2019 pada IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jambi.

Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Hasil evaluasi AKIP oleh Itama pada BPK Perwakilan Provinsi adalah 87,88 dengan kategori A, sesuai Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 374/ND/XI/09/2020 tanggal 14 September 2020. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 86,00 dengan kategori A.

Pencapaian IKU 8 dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut.

**Tabel 3-8**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020**

IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian			
			2019	2018	2017	2016
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	A	A	A	BB	A	A

## 9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Anaystic*). Selain itu, Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, portal eAudit, SIPTL dan penggunaan *Big Data Analytics*) dan pemanfaatan

Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mendorong IT Culture di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Berdasarkan penilaian dari Biro TI, Capaian IKU 9 BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2020 sebesar 99,31% melebihi target pada rencana aksi sebesar 95%.

Capaian ini meliputi:

- Layanan Dasar, sebesar 100%
- Layanan Aplikasi Umum, sebesar 97,24%
- Layanan Aplikasi Pemeriksaan, sebesar 100%
- Layanan Aplikasi Manajemen Pengetahuan, sebesar 100%.

IKU ini adalah indikator yang pada tahun 2019 muncul pada IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. Pencapaian IKU 9 dari tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut.

**Tabel 3-9**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020**

IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian			
			2019	2018	2017	2016
IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00%	99,31%	99,17%	97,99%	78%	86,56%



## 10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing/penyebaran informasi/pengetahuan*. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, *review* pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Penilaian IKU ini melalui Tingkat Penyusunan *Best Practice*, Tingkat Penerapan *Best Practice*, dan Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Pada Tahun 2020, Capaian BPK Perwakilan Provinsi Jambi atas IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan sebesar 125%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat Penyusunan *Best Practice*, dengan judul Tim Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Video Conference di BPK Perwakilan Provinsi Jambi, melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 481/ND/XVIII.JMB/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Hasil Penilaian dari Direktorat EPP melalui Nota Dinas 689/ND/XII/12/2020 tanggal 23 Desember 2020;
2. Tingkat Penerapan *Best Practice*, dengan judul Kantor Peduli Lingkungan (*Eco Office*) melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 379/ND/XVIII.JMB/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020; dan

3. Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan melalui Aktivitas Coaching yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor 11/ND/XVIII.JMB/1/2021 tanggal 8 Januari 2021.

IKU ini muncul di Tahun 2019 pada IK 3.2.3 Jumlah Best-Practice yang Disusun dan IK 3.2.4 Tingkat Penerapan Best-Practice.

Pencapaian IKU10 dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut.

**Tabel 3-10**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020**

IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian			
			2019	2018	2017	2016
IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	125%	100%	100%	N/A	N/A

## **11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Subbagian Humas atau Humas dan TU Kalan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Subbagian Humas atau Humas dan TU Kalan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

IKU ini merupakan IKU baru yang muncul di Tahun 2020, dengan penilaian skor didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT. Wahana Data Utama.

Skala Pengukuran IKU tersebut adalah:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Berdasarkan hasil survey tahun 2020, capaian IKU 11 Tahun 2020 sebesar 3,84 dengan kategori memuaskan, melebihi target sebesar 3,8.

## 12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

- a. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
- b. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)
- c. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa
- d. Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru.
- e. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama

IKU ini muncul di tahun 2019 pada IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dan IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

Capaian IKU 12 Tahun 2020 sebesar 98,95%, dimana dari 95 PNS pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi, terdapat 1 (satu) orang yang tidak memenuhi jam diklat pengembangan kompetensi. Capaian ini turun dari Tahun 2019, dimana seluruh pegawai telah memenuhi jam diklat yang disyaratkan.

Pencapaian IKU 12 dari tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut.

**Tabel 3-11**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020**

IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian			
			2019	2018	2017	2016
IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,95%	100%	94,12%	83,33%	90,32%

## 13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran.

Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. IKU ini merupakan upaya BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam mendukung pengelolaan keuangan BPK yang efisien, efektif dan ekonomis

dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. IKU ini muncul di tahun 2019 pada IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 tahun 2011, dinilai dari 4 indikator, yaitu:

1. penyerapan anggaran
2. konsistensi antara perencanaan dan implementasi
3. pencapaian keluaran
4. efisiensi

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksana pemeriksaan tersebut. Capaian IKU ini di tahun 2020 sebesar 93,30%, melebihi target sebesar 87%, sehingga skor menjadi 105,00.

Selanjutnya uraian atas capaian IKU ini dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut.

**Tabel 3-12**  
**Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020**

IKU/IK	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian			
			2019	2018	2017	2016
IKU 13 Tingkat kinerja Implementasi Kinerja	85,00%	93,30%	83,37	83,78%	86,08%	92,77%

## **B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020**

Dalam mencapai target kinerja yang tertuang dalam Pernyataan Komitmen dan Perjanjian Kinerja (PKPK) 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran untuk pembiayaan kegiatan sebesar Rp19.156.491.000,00. Anggaran sebesar tersebut di atas memperoleh alokasi tambahan sebesar Rp292.134.000,00 sehingga alokasi total anggaran seluruhnya setelah revisi sebesar Rp19.448.625.000,00.

**Tabel 3.13**  
**Alokasi dan Revisi Anggaran 2020**

No.	Nama Jenis Keluaran	Pagu Anggaran 2019 (Awal)	Revisi	Pagu Anggaran 2019 (Akhir)
1	Rumusan Bahan Pendapat	7.648.000	(6.316.000)	1.332.000
2	Layanan Administrasi Pemeriksaan	302.458.000	(9.891.000)	292.567.000
3	Sumbangan IHPS	37.859.000	(7.511.000)	30.348.000
4	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	655.057.000	(195.846.000)	459.211.000
5	Laporan Hasil Pemeriksaan Perwakilan Provinsi Jambi	3.018.546.000	(125.783.000)	2.892.763.000
6	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	340.944.000	148.008.000	488.952.000
7	Laporan Profil Entitas	4.433.000	0	4.433.000
8	Layanan Sekretariat Perwakilan	1.390.974.000	(500.687.000)	890.287.000
9	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Jambi	249.744.000	(91.316.000)	158.428.000
10	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	2.233.137.000	180.579.000	2.413.716.000
11	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	772.760.000	904.197.000	1.676.957.000
12	Layanan Perkantoran	10.142.931.000	(3.300.000)	10.139.631.000
	<b>Jumlah</b>	<b>19.156.491.000</b>	<b>292.134.000</b>	<b>19.448.625.000</b>

Dari total anggaran setelah revisi sebesar tersebut di muka, BPK Perwakilan Jambi telah merealisasikan sebesar Rp18.764.993.133,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

No	Nama Jenis Keluaran	Total Pagu Revisi	Total Realisasi	%
1	Rumusan Bahan Pendapat	1.332.000	1.326.000	99,55%
2	Layanan Administrasi Pemeriksaan	292.567.000	292.317.853	99,91%
3	Sumbangan IHPS	30.348.000	30.335.611	99,96%
4	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	459.211.000	459.209.687	100,00%
5	Laporan Hasil Pemeriksaan Perwakilan Provinsi Jambi	2.892.763.000	2.693.769.375	93,12%
6	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	488.952.000	347.568.125	71,08%
7	Laporan Profil Entitas	4.433.000	4.400.000	99,26%
8	Layanan Sekretariat Perwakilan	890.287.000	874.922.422	98,27%
9	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Jambi	158.428.000	158.245.500	100,00%
10	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	2.413.716.000	2.413.581.290	99,99%

No	Nama Jenis Keluaran	Total Pagu Revisi	Total Realisasi	%
11	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.676.957.000	1.675.911.345	99,94%
12	Layanan Perkantoran	10.139.631.000	9.813.405.925	96,78%
		<b>19.448.625.000</b>	<b>18.764.993.133</b>	<b>99,50%</b>

### C. KINERJA LAINNYA

Selain pencapaian berupa kinerja yang memiliki indikator kinerja yang sudah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jambi juga berhasil meraih Penghargaan sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penerimaan penghargaan dimaksud dapat menggambarkan bahwa disamping berusaha mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan, pelaksanaan kegiatan juga memperhatikan nilai-nilai integritas dalam pemberian pelayanan publik kepada para pemegang kepentingan.

Penganugerahan penghargaan diberikan sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 10 Desember 2019. Dengan adanya penghargaan tersebut, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi Pimpinan dan seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk dapat berprestasi di banyak bidang lainnya.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi merupakan sumbangan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Badan Pemeriksa Keuangan menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis BPK tahun 2020 – 2024. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Jambi tahun 2020 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas baik di bidang pemeriksaan maupun penunjang/pendukung pemeriksaan yang tertuang dalam indikator kinerja utama PKPK 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan BPK Perwakilan Provinsi Jambi secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan Satuan Kerja.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian besar indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik namun terdapat juga indikator yang masih berada di bawah target.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen PKPK 2019 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 13 IKU tahun 2020, sebanyak 9 IKU (69,23%) berstatus hijau dan empat IKU (30,76%) berstatus kuning, serta tidak terdapat IKU yang berstatus merah. Empat IKU/IK yang belum mencapai target dan perlu mendapat perhatian khusus adalah sebagai berikut.

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
3. IKU 7 Indeks Implementasi Nili Dasar BPK

#### 4. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Untuk IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dengan capaian sebesar 95,83% dari target 100%, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan berusaha lebih maksimal untuk memastikan tingkat konsistensi isi LHP yang diterbitkan agar kesalahan tahun ini tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang.

Terhadap IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan capaian target tahun 2020 sebesar 70,70% dari target 75%, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan mengoptimalkan dan mendorong seluruh entitas pemeriksaan untuk melakukan proses penyelesaian TLRHP melalui aplikasi SiPTL yang secara langsung dapat diakses oleh seluruh entitas pemeriksaan, sehingga akan mempercepat penyelesaiannya. Disamping itu juga akan melanjutkan upaya yang sudah dimulai tahun 2020 yaitu dengan menambah waktu pelaksanaan forum TLRHP.

Untuk IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK yang pada tahun 2020 ini indeks hasil survey nilai 4,50 dari target sebesar 5, pada tahun mendatang BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan menambah kegiatan sosialisasi maupun pengarahan – pengarahan oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai, guna mendorong meningkatnya pemahaman dan penghayatan visi, misi dan nilai – nilai dasar BPK baik dalam kehidupan profesionalnya maupun secara personal.

Untuk IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan lebih mendorong pegawai untuk mengikuti diklat, sehingga semua pegawai dapat memenuhi jam diklat yang dipersyaratkan, selain juga melaksanakan diklat pemeriksaan dan penunjang di kantor perwakilan.

Sedangkan untuk IKU yang telah mencapai maupun melampaui target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Jambi akan terus memotivasi diri baik Pimpinan maupun seluruh pegawai untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Satuan Kerja, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan keputusan dan penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK.



# LAMPIRAN



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA  
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Jambi

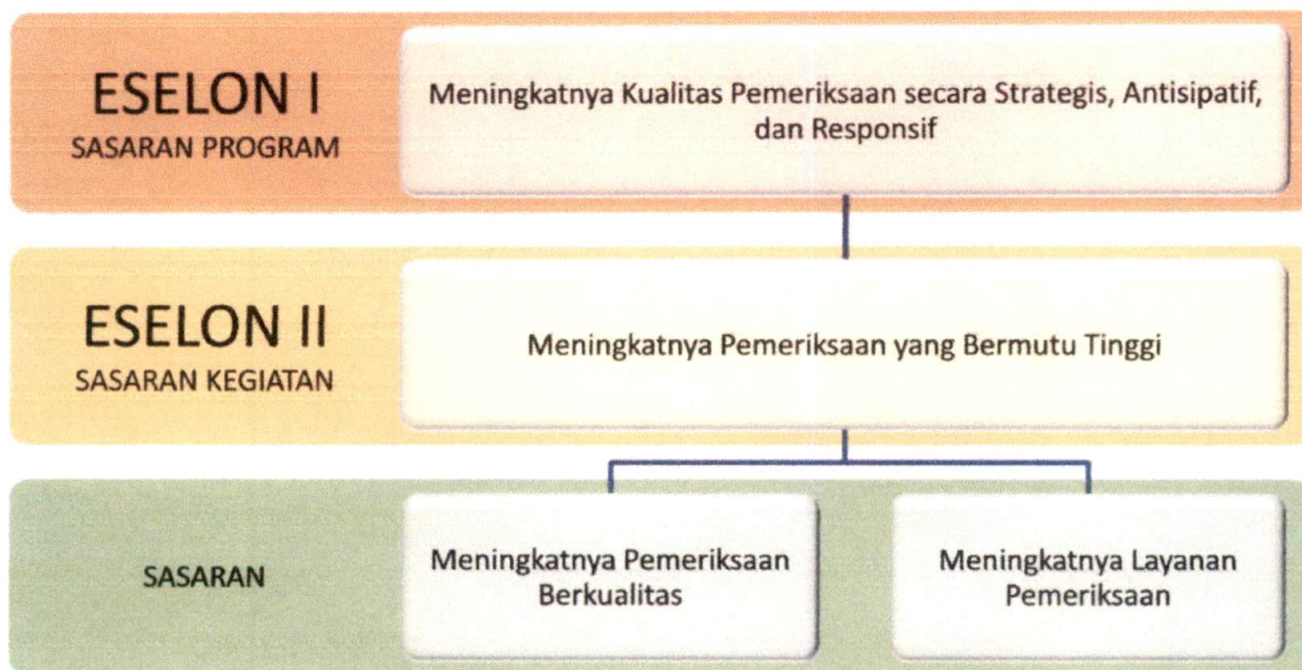
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA., CA., CSFA  
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2020. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.



## INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp19.156.491.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	Rp6.849.826.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp12.306.665.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

Jakarta, 6 April 2020

**Pihak Kedua,**



**Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA., CA., CSFA**

**Pihak Pertama,**



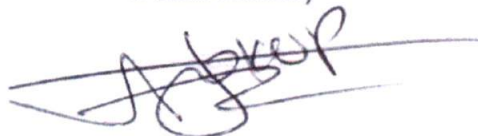
**Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA**

Diketahui oleh:  
Anggota V,



**Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.**

**Wakil Ketua,**



**Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA**

**Ketua,**



**Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., CSFA**

## INDIKATOR KINERJA KELUARAN DAN TARGET TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	100%
		LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%
		Laporan Interim/ Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%
		Laporan Pemantauan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	100%
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%
		Layanan Administrasi Pemeriksaan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	Memuaskan (3,80)
		Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Sekretariat Perwakilan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor			1 Paket
Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan			95%
			Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%

Indikator	Kriteria	Catatan
Ketepatan Waktu (keluaran/subkeluaran)	Batas waktu sesuai berakhirnya ST,POS, P2, atau Disposisi Atasan Langsung=100% Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95% Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja =90% Penyampaian terlambat >10 hari kerja =85%	1. Penilaian dilaksanakan secara mandiri. 2. Penilaian didasarkan atas dokumen/keluaran yang disampaikan kepada atasan langsung Eselon 2 atau pihak terkait (tidak termasuk LHP atau dokumen lainnya yang sudah diukur dalam Indikator Sasaran Kegiatan Eselon 2 terkait)
Indeks Kepuasan Layanan	Skala 1-5 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan 3,00 - 3,99 = memuaskan 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan	

Jakarta, 6 April 2020

**Pihak Kedua,**



**Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA., CA., CSFA**

**Pihak Pertama,**



**Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA**



## PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

### SATUAN KERJA PEMILIK RISIKO BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pada Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Saya menyatakan bahwa:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan komitmen penerapan manajemen risiko yang meliputi penetapan konteks, profil dan peta risiko, serta penanganan risiko pada level Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
2. Pelaksanaan proses tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan manajemen risiko yang berlaku di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3. Rencana aksi penanganan risiko dilaksanakan oleh seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, Saya berkomitmen melaksanakan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin.

Jakarta, 6 April 2020

Kepala Perwakilan Provinsi Jambi,

Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA

Diketahui oleh:

Anggota V,

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM.,  
CSFA., CPA.

Wakil Ketua,

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak.,  
CA., CPA., CSFA

Tortama KN V,

Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA.,  
CA., CSFA

Ketua,

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E.,  
M.Si., CSFA



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM 6,5  
Nomor 65 Kel. Sukakarya Kec.  
Kota Baru Jambi 36127  
Telp : (0741) 445388, Fax : (0741) 445386  
<https://jambi.bpk.go.id>